PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JALAN BELITON NOMOR 2 DENPASAR – (80112), TELEPON (0361) 222883,
Laman : dispuprkim.baliprov.go.id, Pos-el : puprkim@baliprov.go.id

KEPUTUSAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI
NOMOR : B.25.600.1.15.2/4769/CK/DISPUPR.PERKIM

TENTANG

SURAT PENUNJUKKAN PENYEDIA BARANG / JASA (SPPBJ)
UNTUK PAKET PEKERJAAN PENATAAN AREA PARAHYANGAN DI KAWASAN SUCI BESAKIH DI KABUPATEN KARANGASEM (PURA CATUR LOKA PALA)

KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA SUB KEGIATAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Bali Nomor: B.38.000.3.3/18750/P08.P2P/B.PBJEK, tanggal 20 April 2026, Hal: Pemberitahuan Hasil Pemilihan, Paket Pekerjaan Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih Kabupaten di Karangasem (Pura Catur Loka Pala) pada Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, pada Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
b. bahwa pengadaan melalui Tender sebagaimana dimaksud huruf a, sudah selesai dilaksanakan yang dimenangkan oleh PT. MANIK SEKECAP KARYA beralamat di Jl. Blumbungan, Br. Parekan, Kel. Sibang Gede, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, Provinsi Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
7. Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor: 182/SE/DK/2025 Tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 64;
12. Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
13. Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
15. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun

2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Evaluasi Kewajaran Harga Pada Tender Barang/Jasa Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi;

16. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penegasan Larangan Penambahan Syarat Kualifikasi Penyedia dan Syarat Teknis dalam Proses Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 114/KPTS/Dk/ 2024 Tentang Penetapan Jabatan Kerja Dan Jenjang Kualifikasi Atas Jabatan Kerja di Bidang Jasa Konstruksi
18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kebijakan Jasa Konstruksi di Bali;
19. Keputusan Gubernur Bali Nomor 1011/03-M/HK/2025 tanggal 19 Desember 2025 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2026;
20. Standar Nasional Indonesia 1726:2019 Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan NonGedung sebagai Revisi Dari Standar Nasional Indonesia 1726:2012 Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung dan Nongedung;
21. Peraturan umum Pemeriksaan Bahan-bahan Bangunan (PUPBNI-3/56);
22. Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971 (PBI1971);
23. Peraturan Umum Bahan Nasional (PUBI982);
24. Peraturan Perburuhan di Indonesia (Tentang Pengarahan Tenaga Kerja);
25. Peraturan-peraturan di Indonesia (Tentang Pengarahan Tenaga Kerja);
26. SKSNIT-15-1991-03 Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung;
27. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali No. DPPA/A. 2/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2026 tanggal 14 April 2026 Tahun Anggaran 2026;
28. Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Nomor: B.25.100.3/125/SEKRET/DISPUPR.PERKIM, tanggal 2 Januari 2026 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Perusahaan :

Nama : **PT. MANIK SEKECAP KARYA**

NPWP : [redacted]

Alamat : Jl. Blumbungan, Br. Parekan, Kel. Sibang Gede, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, Provinsi Bali.

Harga : Rp. 54.606.548.000,00
(Lima puluh empat miliar enam ratus enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

sebagai Pemenang Paket Pekerjaan PENATAAN AREA PARAHYANGAN DI KAWASAN SUCI BESAKIH KABUPATEN DI KARANGASEM (PURA CATUR LOKA PALA).

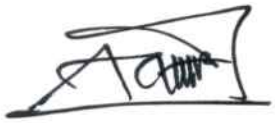
KEDUA : Segala yang berhubungan dengan pekerjaan ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Besarnya Nilai Jaminan Pelaksanaan yaitu :
5% x Nilai Penawaran Terkoreksi = 5% x Rp. 54.606.548.000 = Rp. 2.730.327.400 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
Jangka waktu jaminan pelaksanaan 224 (dua ratus dua puluh empat) hari terhitung dari diterbitkannya SPMK.

KEEMPAT : Pekerjaan harus dimulai bersamaan dengan diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal 22 April 2026

Bali, 22 April 2026
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
(Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)



I Made Mahardika S.T., M.T.
[redacted]

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Dinas PUPRKIM Povinsi Bali selaku Pengguna Anggaran, (sebagai laporan);
2. PPTK pada Bidang Cipta Karya Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, (sebagai laporan);
3. Kepala Seksi Penata Bangunan dan Lingkungan, (sebagai laporan);
4. Arsip